

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Novi, F., Akuntansi, A., Ekonomi, F., Bisnis, D., Andriyani, N., Akuntansi, B., & Akuntansi, S. M. (2020). KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN KUDUS SELAMA PANDEMI COVID-19. In *Seminar Nasional Manajemen*.

B. Buku

Suryanovi, Sri. (2014). *Buku Seri Akuntansi Pemerintah Akuntansi Pemerintah Pusat (Buku 2)*. STAN PRESS.

C. Peraturan

Buletin Teknis Nomor 24 tentang *Akuntansi Pendapatan Perpajakan*.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tentang *Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 *tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.1/SJ.2/2021 *tentang uraian jabatan strukturan pada instansi vertikal dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 *tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 *tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

Surat Edaran Nomor 38 Tahun 2020 *tentang Implementasi Aplikasi Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System dalam Rangka Pencatatan Transaksi Perpajakan*

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.

D. Sumber Lainnya

Syahdi Hamid, A., 2021. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus 2020*. Kudus: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus.